



KOMDIGI

LHE RENSTRA

**Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Natuna
2021 - 2026**



**Pemerintah Kabupaten Natuna
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Batu Sisir, Bukit Arai Gedung B Pulau Senoa Lt.II Natuna, Kepulauan Riau 29777

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2021–2026 dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan LHE ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra telah berjalan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Melalui laporan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai capaian, tantangan, serta langkah perbaikan yang perlu dilakukan guna meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa hasil yang dicapai belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan agar laporan ini dapat menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan di tahun-tahun berikutnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga LHE Renstra Diskominfo Natuna Tahun 2021–2026 dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas layanan publik, khususnya di bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Natuna.

Natuna, Agustus 2025

Kepala Dinas,



IKHWAN SOLIHIN, SE, M.A

NIP. 19711208 200003 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.1.1 Maksud dan Tujuan	1
I.1.2 Landasan Hukum	1
I.1.3 Ruang Lingkup Evaluasi	2
I.1.4 Metodologi.....	2
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT PERANGKAT DAERAH .	4
II.1 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Perangkat Daerah.....	4
II.2 Hambatan Pelaksanaan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10
II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
II.4 Pencapaian Program Kinerja Diskominfo Natuna	12
II.5 Evaluasi Program Kegiatan dan Indikator Kinerja.....	16
BAB III EVALUASI PROGRAM KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA	17
III.1 Hasil Analisis dalam Penilaian Dokumen Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Natuna	17
III.2 Identifikasi Keberhasilan Hasil Analisis Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Natuna.....	18
BAB IV REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	38
IV.1 Rekomendasi Hasil Evaluasi, Analisis dan Penilaian	38
IV.2 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi, Analisis dan Penilaian.....	38
BAB V PENUTUP	40
V.1 Kesimpulan.....	40

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah menjadi pedoman penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, penyusunan Renstra 2021–2025 menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan di bidang komunikasi, informasi, serta pengembangan teknologi digital.

Sebagai wujud pertanggungjawaban, setiap perangkat daerah wajib melaksanakan evaluasi terhadap Renstra untuk menilai capaian kinerja, efektivitas program, serta kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan pembangunan daerah. Evaluasi ini juga berfungsi untuk melihat sejauh mana program Dinas Komunikasi dan Informatika mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan strategis dalam era digitalisasi pemerintahan.

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Renstra 2021–2025 disusun untuk memberikan gambaran capaian indikator, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan. Dokumen ini diharapkan menjadi masukan dalam penyusunan perencanaan berikutnya serta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah agar program komunikasi dan informatika di Kabupaten Natuna selaras dengan kebijakan nasional maupun arah pembangunan daerah.

I.1.1 Maksud & Tujuan Evaluasi Renstra

1.1 Maksud Evaluasi Renstra

penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Renstra 2021–2025 adalah untuk menilai secara sistematis capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna. LHE ini menjadi sarana pertanggungjawaban sekaligus bahan refleksi guna memperbaiki dan menyempurnakan arah kebijakan di bidang komunikasi, informatika, serta pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

1.2 Tujuan Evaluasi Renstra

1. Mengukur tingkat pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021–2025.
2. Mengidentifikasi permasalahan, kendala, serta faktor pendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan dan strategi penguatan untuk periode perencanaan selanjutnya.
4. Menjadi acuan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis data dan teknologi informasi yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional.

I.1.2 Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan bupati Natuna Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna

I.1.3 Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah meliputi :

1. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras dalam pencapaian dan mewujudkan hasil yang berkesinambungan
2. Evaluasi Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja
3. Menilai keselarasan analisis capaian berdasarkan indikator terukur untuk efektifitas dan efisiensi kinerja
4. Mengidentifikasi keberhasilan terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan, tantangan serta faktor internal dan eksternal
5. Menilai penyusunan langkah – langkah permasalahan dengan isu strategis yang berkembang dimasyarakat

I.1.4 Metodologi

Evaluasi Renstra ini dilakukan dengan analisis dokumen serta data kuantitatif dan kualitatif. Kajian difokuskan pada Renstra 2021–2025 untuk menilai kesesuaian rencana, pelaksanaan, dan hasil melalui pengumpulan serta analisis data yang ditafsirkan secara profesional sesuai kriteria yang ditetapkan dengan langkah – langkah berikut :

1. Menghimpun Dokumen Renstra 2021 – 2025, Laporan Kinerja, Capaian Indikator serta regulasi terkait
2. Mengkaji isi Dokumen untuk untuk melihat konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang diperoleh
3. Menganalisis data kuantitatif guna mengukur tingkat pencapaian indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan.
4. Menganalisis data kualitatif melalui penafsiran mendalam atas temuan dari dokumen, wawancara, maupun observasi.
5. Menyusun hasil evaluasi dan rekomendasi dalam bentuk laporan yang sistematis untuk perbaikan Renstra berikutnya.

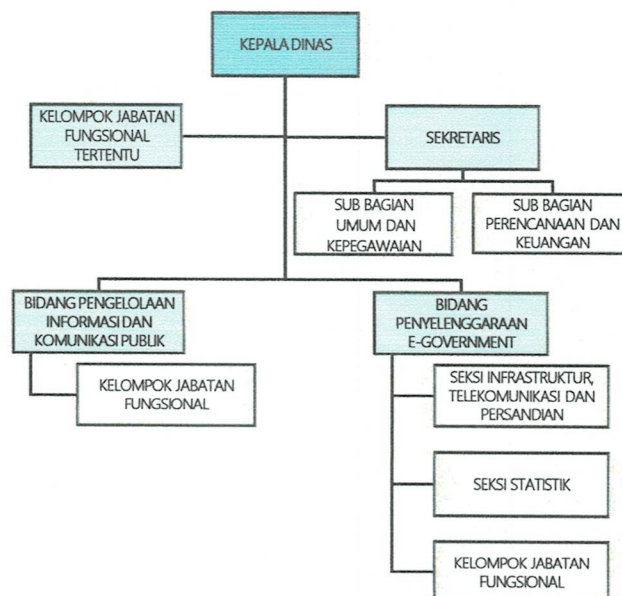
BAB II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN RENSTRA

II.1 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah dilakukan perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna merupakan Dinas dengan Type C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian. Sesuai Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, maka tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna sesuai susunan organisasi dan rincian tugas dan fungsi setiap jabatan. Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - d. Bidang Penyelenggaraan *e-Government* terdiri dari :
 1. Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Persandian;
 2. Seksi Statistik; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- ✧ Struktur Organisasi (Dinas Komunikasi dan Informatika)

Gambar : II.1.
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NATUNA

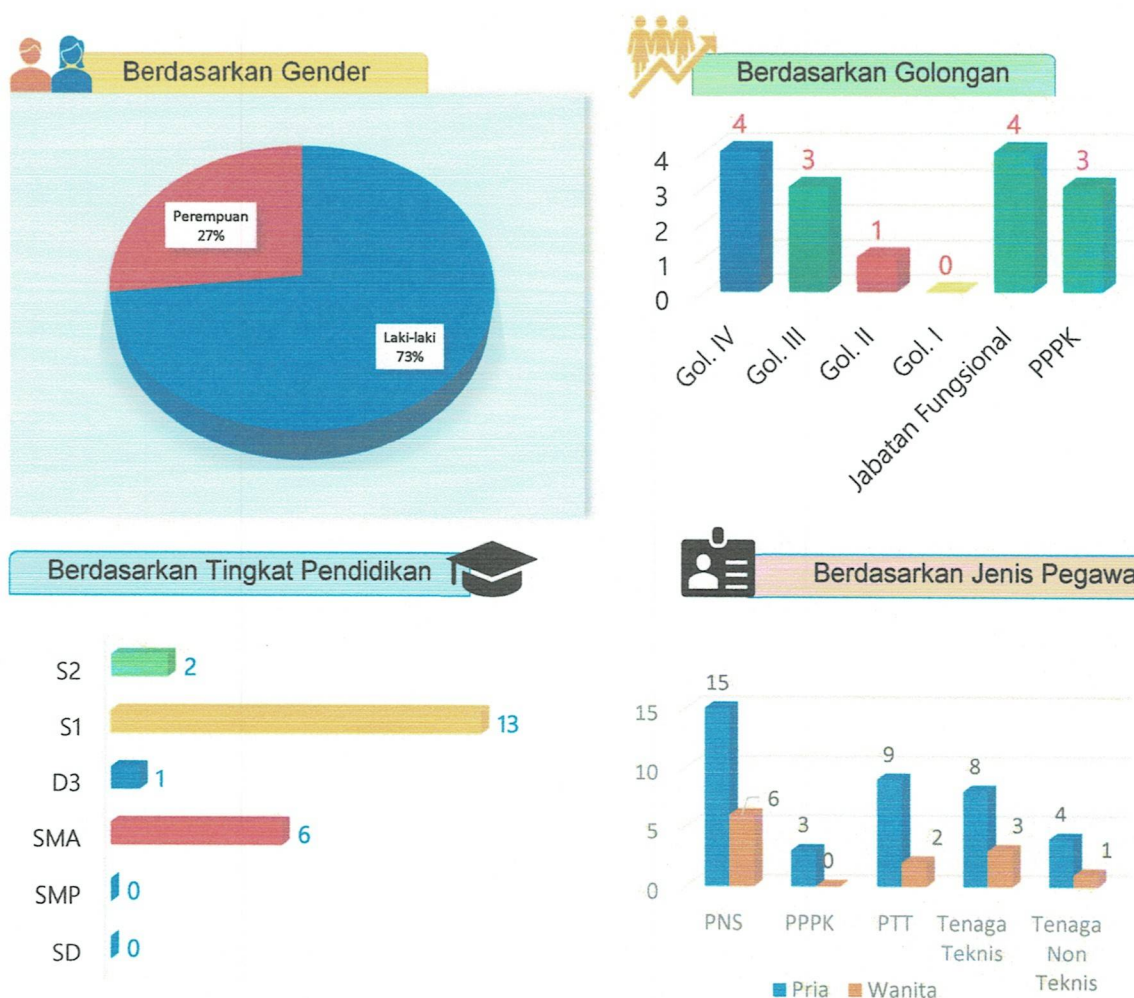


❖ Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna didukung oleh 50 orang pegawai ASN (PNS 22 Orang PPPK 2 orang) dan orang Non ASN (data per 31 Desember 2023) mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dengan jumlah 43 orang dikarenakan adanya pindah tugas ASN maupun PTT. Dari jumlah 50 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 36 orang dan perempuan sebanyak 14 orang. Terdiri dari 22 orang PNS, 2 Orang PPPK, 12 orang PTT, 10 orang Tenaga Teknologi dan Informasi dan 2 orang Tenaga Kontrak dan 2 Orang Kebersihan.

Tabel II.I.

KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN ESELON JABATAN



Sumber: Sub bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Natuna (Desember 2024)

✧ Aset

Aset tetap yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar
Rp 12.273.237.589,89 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.

ASET TETAP DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	NAMA	UNIT	SALDO
1.3.1.	TANAH		69.693.800,00
1.3.1.02.02.	Tanah		69.693.800,00
1.3.2.	PERALATAN DAN MESIN		10.219.060.080,00
1.3.2.02.01.	Alat Angkutan Darat Bermotor	4	815.364.500,00
1.3.2.03.01.	Alat Bengkel Bermesin	2	12.890.000,00
1.3.2.03.02.	Alat Bengkel Tak Bermesin	1	1.350.000,00
1.3.2.05.01.	Alat Kantor	15	173.150.000,00
1.3.2.05.02.	Alat Rumah Tangga	138	512.190.000,00
1.3.2.05.03.	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	31	120.877.000,00
1.3.2.06.01.	Alat Studio	62	3.909.515.000,00
1.3.2.06.02.	Alat Komunikasi	27	171.930.000,00
1.3.2.08.08.	Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	7	39.920.000,00
1.3.2.10.01.	Komputer Unit	51	3.417.347.480,00
1.3.2.10.02.	Peralatan Komputer	71	1.045.426.100,00
1.3.3.	GEDUNG DAN BANGUNAN		7.412.993.109,00
1.3.3.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja		7.412.993.109,00
	AKUMULASI PENYUSUTAN		(5.428.809.399,11)
	AKUMULASI PENYUSUTAN		(5.428.809.399,11)
JUMLAH		409	12.273.237.589,89

Sumber: Sub bagian Perencanaan dan Keuangan (Desember 2024)

Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi berdasarkan kode barang dan kondisinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.

Rekapitulasi KIB B Peralatan dan Mesin

No Urut	Kode Barang	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah (Unit)	Total Harga Perolehan (Rp)	Kondisi	
					Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7
	1	ASET				
	1.3.	ASET TETAP				
	1.3.2.	PERALATAN DAN MESIN				

No Urut	Kode Barang	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah (Unit)	Total Harga Perolehan (Rp)	Kondisi	
					Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7
	1.3.2.02.	ALAT ANGKUTAN				
	1.3.2.02.01.	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	4	815.364.500,00	4	0
1	1.3.2.02.01.02.003.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3	799.200.000,00	3	-
2	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	1	16.164.500,00	1	-
	1.3.2.03.	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR				
	1.3.2.03.01.	ALAT BENGKEL BERMESIN	3	14.240.000,00	3	0
3	1.3.2.03.01.01.019.	Mesin Las Listrik	1	1.000.000,00	1	-
4	1.3.2.03.01.03.035.	Accu/Power Backup	1	11.890.000,00	1	-
5	1.3.2.03.02.05.001.	Tool Kit Set	1	1.350.000,00	1	-
	1.3.2.05.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA				
	1.3.2.05.01.	ALAT KANTOR	15	173.150.000,00	15	0
6	1.3.2.05.01.04.001.	Lemari Besi/Metal	2	19.900.000,00	2	-
7	1.3.2.05.01.04.005.	Filing Cabinet Besi	3	19.200.000,00	3	-
8	1.3.2.05.01.05.010.	Alat Penghancur Kertas	3	11.280.000,00	3	-
9	1.3.2.05.01.05.043.	LCD Projektor/Infocus	1	5.950.000,00	1	-
10	1.3.2.05.01.05.053.	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	2.100.000,00	1	-
11	1.3.2.05.01.05.089.	Mesin Genset	1	98.450.000,00	1	-
12	1.3.2.05.01.05.090.	Mesin Pompa Air	2	5.900.000,00	2	-
13	1.3.2.05.01.05.114.	Tenda	1	10.370.000,00	1	-
	1.3.2.05.02.	ALAT RUMAH TANGGA	138	512.190.000,00	138	0
10	1.3.2.05.02.01.002.	Meja Kerja Kayu	41	155.800.000,00	41	-
11	1.3.2.05.02.01.008.	Meja Rapat	2	41.625.000,00	2	-
12	1.3.2.05.02.01.030.	Kursi Rapat	24	38.200.000,00	24	-
13	1.3.2.05.02.01.032.	Kursi Putar	41	63.550.000,00	41	-
14	1.3.2.05.02.01.048.	Sofa	1	10.900.000,00	1	-
15	1.3.2.05.02.01.050.	Lemari Kayu	3	16.400.000,00	3	-
16	1.3.2.05.02.01.067.	Kursi Tunggu	2	7.300.000,00	2	-
17	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	17	119.770.000,00	17	-
18	1.3.2.05.02.06.007.	Loudspeaker	1	6.900.000,00	1	-
19	1.3.2.05.02.06.008.	Sound System	1	8.500.000,00	1	-
20	1.3.2.05.02.06.012.	Wireless	4	19.000.000,00	4	-
	1.3.2.05.02.06.116.	Gorden/Tirai	1	19.800.000,00	1	-
	1.3.2.05.02.06.149.	Monitor PC	1	4.445.000,00	1	-

No Urut	Kode Barang	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah (Unit)	Total Harga Perolehan (Rp)	Kondisi	
					Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7
	1.3.2.05.03.	MEJA DAN KURSI KERJA /RAPAT PEJABAT	31	120..877.000,00	31	0
21	1.3.2.05.03.01.004.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	6.400.000,00	1	-
22	1.3.2.05.03.01.005.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	14.550.000,00	3	-
23	1.3.2.05.03.01.006.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5	19.500.000,00	5	-
24	1.3.2.05.03.01.008.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5	13.541.000,00	5	-
25	1.3.2.05.03.01.009.	Meja Kerja Pejabat Lainnya	1	10.000.000,00	1	-
	1.3.2.05.03.03.004.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	7.450.000,00	3	-
26	1.3.2.05.03.03.005.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	16.200.000,00	3	-
27	1.3.2.05.03.03.006.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	16.250.000,00	5	-
28	1.3.2.05.03.03.008.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	7	16.986.000,00	7	-
	1.3.2.06.	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR				
	1.3.2.06.01	ALAT STUDIO	62	3.908.615.000,00	62	0
32	1.3.2.06.01.01.002.	Audio Mixing Portable	1	11.250.000,00	1	-
33	1.3.2.06.01.01.005.	Audio Amplifier	1	12.850.000,00	1	-
34	1.3.2.06.01.01.021.	Compact Disc Juke Box System	2	4.000.000,00	2	-
35	1.3.2.06.01.01.029.	Turn Table	1	11.900.000,00	1	-
	1.3.2.06.01.01.035.	Modulation Monitor Speaker Kabaret	1	15.000.000,00	1	-
	1.3.2.06.01.01.036.	Microphone/Wireless MIC	4	19.800.000,00	4	-
	1.3.2.06.01.01.041.	Professional Sound System	1	99.850.000,00	1	-
	1.3.2.06.01.01.049.	Master Control Desk	1	19.890.000,00	1	-
	1.3.2.06.01.01.078.	Microphone Cable	4	8.000.000,00	4	-
	1.3.2.06.01.01.087.	Voice Recorder	1	6.990.000,00	1	-
	1.3.2.06.01.01.097.	Camera + Attachment	1	79.915.000,00	1	-
	1.3.2.06.01.02.016.	Video Switcher	2	59.500.000,00	2	-
	1.3.2.06.01.02.034.	Teleprompter	1	74.950.000,00	1	-
	1.3.2.06.01.02.037.	Automatic Editing Control (Peralatan Studio Video dan Film)	1	13.500.000,00	1	-
	1.3.2.06.01.02.045.	Tripod Camera	9	22.200.000,00	9	-
	1.3.2.06.01.02.060.	Camera Film	2	24.000.000,00	2	-
	1.3.2.06.01.02.061.	Lensa Kamera	6	119.755.000,00	6	-
36	1.3.2.06.01.02.074.	Mixer PVC	2	39.865.000,00	2	-
	1.3.2.06.01.02.089.	Meja Editing Film	1	9.935.000,00	1	-

No Urut	Kode Barang	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah (Unit)	Total Harga Perolehan (Rp)	Kondisi	
					Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7
	1.3.2.06.01.02.105.	Layar Film/Projector	3	2.775.000.000,00	3	-
	1.3.2.06.01.02.116.	Head Set	1	7.900.000,00	2	-
	1.3.2.06.01.02.126.	Camera Digital	4	140.000.000,00	4	-
	1.3.2.06.01.02.128.	Lampu Blitz Kamera	2	19.970.000,00	2	-
	1.3.2.06.01.02.130.	Video Confrence	2	94.020.000,00	2	-
	1.3.2.06.01.02.133.	LCD Monitor	1	9.800.000,00	1	-
	1.3.2.06.01.02.138.	Audio Converter	1	31.950.000,00	1	-
	1.3.2.06.01.02.149.	Splitter	1	1.325.000,00	1	-
	1.3.2.06.01.02.154.	Kamera Stile	3	119.700.000,00	3	-
	1.3.2.06.01.05.047.	Kamera Udara	2	55.800.000,00	2	-
	1.3.2.06.	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR				
	1.3.2.06.02	ALAT PEMANCAR	28	171.930.000,00	28	0
	1.3.2.06.02.01.006.	Handy Talky (HT)	20	119.800.000,00	20	-
	1.3.2.06.02.06.007.	Smart Phone	2	31.880.000,00	2	-
	1.3.2.06.02.07.017.	Handphone Encription	4	5.500.000,00	4	-
	1.3.2.06.02.08.017.	Watch Transmitter	2	14.750.000,00	2	-
	1.3.2.08.	ALAT LABORATORIUM				
	1.3.2.08.08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	7	39.920.000,00	7	0
37	1.3.2.08.08.15.005.	Lighting Equipment	7	39.920.000,00	7	-
	1.3.2.10.	KOMPUTER				
	1.3.2.10.01.	KOMPUTER UNIT	51	3.417.347.480,00	51	0
	1.3.2.10.01.01.001.	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	23.086.800,00	1	-
38	1.3.2.10.01.01.003.	Local Area Network (LAN)	2	2.413.516.080,00	2	-
39	1.3.2.10.01.01.004.	Internet	6	109.162.000,00	6	-
40	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	5	136.200.000,00	5	-
41	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	29	625.962.600,00	29	-
42	1.3.2.10.01.02.003.	Note Book	7	87.420.000,00	7	-
	1.3.2.10.01.02.009.	Tablet PC	1	22.000.000,00	1	-
	1.3.2.10.02.	PERALATAN KOMPUTER	71	1.045.426.100,00	71	0
43	1.3.2.10.02.01.012.	Hard Disk	3	15.000.000,00	3	-
44	1.3.2.10.02.01.019.	Ram/Memory	6	16.080.000,00	6	-
45	1.3.2.10.02.03.003.	Printer	12	72.225.000,00	12	-

No Urut	Kode Barang	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah (Unit)	Total Harga Perolehan (Rp)	Kondisi	
					Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7
	1.3.2.10.02.03.007.	External	1	19.000.000,00	1	-
	1.3.2.10.02.03.013.	Capture Card	1	1.450.000,00	1	-
	1.3.2.10.02.03.017.	External/Portable Hardisk	8	13.480.000,00	8	-
	1.3.2.10.02.03.019.	UPS	29	161.450.000,00	29	-
	1.3.2.10.02.04.001.	Server	1	400.000.000,00	20	-
	1.3.2.10.02.04.024.	Switch	2	9.000.000,00	2	-
	1.3.2.10.02.04.027.	Rackmount	2	7.000.000,00	2	-
	1.3.2.10.02.04.033.	Peralatan Jaringan Lainnya	6	330.741.100,00	6	-
JUMLAH			410	10.219.060.080,00	410	-

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (Desember 2024)

II.2 Hambatan Pelaksanaan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam pelaksanaan Renstra 2021–2026, Diskominfo Natuna telah menunjukkan beberapa kemajuan. Capaian yang terlihat antara lain meningkatnya akses informasi publik melalui website resmi, media sosial, dan sistem informasi internal. Selain itu, pembangunan infrastruktur telekomunikasi di beberapa wilayah turut mendukung layanan komunikasi, walaupun masih terkendala kondisi geografis kepulauan.

Di bidang informasi publik, transparansi pemerintahan semakin baik dan masyarakat mendapat akses data yang lebih terbuka. Diskominfo juga berperan dalam mendukung penerapan SPBE melalui penguatan infrastruktur TIK dan peningkatan kemampuan aparatur.

Namun, ada beberapa hambatan yang dihadapi. Keterbatasan anggaran membatasi pemerataan jaringan internet, kondisi geografis pulau-pulau menghambat pembangunan infrastruktur, serta kurangnya SDM yang ahli di bidang TIK membuat pelaksanaan program digitalisasi belum optimal.

Secara umum, meskipun ada kendala, capaian Diskominfo Natuna sudah menunjukkan kemajuan, dan ke depan perlu dukungan strategi serta kebijakan yang lebih kuat untuk mengatasi hambatan tersebut.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan turunan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Natuna. Oleh karena itu, seluruh langkah dalam Renstra Diskominfo Natuna harus selaras dengan **RPJMD Kabupaten Natuna 2021–2026**. RPJMD sendiri disusun berdasarkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang menjadi arah pembangunan daerah selama lima tahun.

Visi Pembangunan 2021–2026

“Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural.”

Misi Pembangunan

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 misi utama, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal.
3. Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis, dan eksotis.
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur.
5. Menjaga lingkungan hidup agar tetap berkelanjutan.
6. Mewujudkan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucracy*).
7. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Dari ketujuh misi tersebut, **tugas dan fungsi Diskominfo Natuna** secara langsung berkaitan dengan:

- **Misi ke-6** → menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucracy*).
- **Misi ke-7** → mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam mendukung pencapaian visi Kabupaten Natuna sebagai kabupaten maritim yang unggul, eksotis, aman, dan mandiri, Diskominfo berperan penting melalui misi ke-6 (reformasi birokrasi cerdas) dan misi ke-7 (optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi).

1. Misi 6 – Reformasi Birokrasi Cerdas (*Smart Bureaucracy*)

Diskominfo menghadapi kendala berupa rendahnya konsistensi perencanaan, kualitas pelayanan aparatur yang masih terbatas, serta belum tersedianya data pembangunan yang sistematis. Selain itu, perubahan kebijakan nasional yang mendadak sering memengaruhi perencanaan daerah, ditambah minimnya pemanfaatan aplikasi e-office. Dalam pengelolaan aplikasi informatika, kendala muncul karena keterbatasan SDM IT, koordinasi antar-OPD yang lemah, arsitektur SPBE yang belum tersusun, serta anggaran TIK yang terbatas. Begitu pula di bidang persandian, hambatan utama adalah belum tersedianya SDM khusus persandian, sarana prasarana yang minim, serta regulasi daerah yang belum berjalan optimal. Meski demikian, terdapat faktor pendorong seperti adanya **Sistem Informasi Perencanaan Kabupaten Natuna**, dukungan Perpres No. 95/2018 tentang SPBE, percepatan transformasi digital nasional, serta kesadaran akan pentingnya keamanan informasi.

2. Misi 7 – Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dalam pengelolaan informasi publik, hambatan utama adalah kompetensi SDM yang masih rendah, pelayanan informasi publik (PPID) yang belum optimal, saluran komunikasi yang belum terkelola baik, serta pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang masih lemah. Di sisi lain, faktor pendorong datang dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya informasi, tersedianya media komunikasi, dan akses internet yang semakin luas. Untuk pengelolaan statistik sektoral, kendala yang muncul adalah kualitas dan kuantitas data yang rendah, portal data terintegrasi yang belum ada, forum satu data yang belum berjalan, serta keterbatasan anggaran. Namun demikian, ada dukungan regulasi berupa **Perpres No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia**, terbentuknya forum satu data daerah, kerja

sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), serta percepatan transformasi digital nasional.

Secara keseluruhan, penghambat utama pelayanan Diskominfo Natuna adalah keterbatasan SDM, infrastruktur, koordinasi antar-OPD, dan anggaran. Sementara faktor pendorong berasal dari regulasi nasional, percepatan transformasi digital, ketersediaan sarana, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan teknologi.

II.3 Pencapaian Program Kinerja Diskominfo Kab.Natuna

Untuk menelaah hasil capaian yang telah terlaksana selama Periode rentra 2021 – 2026 maka disini akan dikelompokkan sasaran Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna yaitu sebagai berikut :

A. Pelayanan Bidang Penyelenggaraan e-Government

Pengelolaan akses internet terintegrasi adalah upaya menyambungkan jaringan internet antar wilayah, instansi, dan layanan publik dalam satu sistem yang menyatu, agar akses internet bisa merata, aman, efisien, dan berkelanjutan di seluruh daerah.

Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Telak melaksanakan Hapir seluruh wilayah Kabupaten Natuna yang terintegrasi melalui jaringan intra pemerintah yang di kelola oleh Diskominfo yang telah dibangun sejak 2017, sehingga kinerja lebih menitik beratkan kepada perawatan dan pemeliharaan peralatan jaringan serta melakukan koordinasi ke kementerian Komunikasi dan Digital dalam hal Daerah yang terdapat black spot dan jangkauan sinyal yang lemah sehingga kelancaran dan kenyamanan akses telekomunikasi berjalan lancar

B. Pelayanan Dalam Peran penyediaan data statistik sektoral

Pemerintah daerah, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, berperan aktif dalam mendukung program Satu Data Indonesia dengan menghadirkan portal **Satu Data Natuna** pada tautan <https://satudata.natunakab.go.id/> yang telah terintegrasi dengan sistem nasional. Diskominfo Natuna berupaya menyediakan data yang selalu mutakhir, menghimpun data dari berbagai OPD di lingkungan Kabupaten Natuna, serta melengkapi dengan metadata yang terkelola dengan baik. Meskipun masih terdapat sejumlah kendala, penyediaan data statistik sektoral di daerah tersebut belum sepenuhnya optimal.

C. Pelayanan Dalam Peran Serta Persandian dan Pengamanan Informasi

Diskominfo Natuna menyelenggarakan persandian untuk menjaga keamanan data, antara lain dengan penggunaan **Tanda Tangan Elektronik (TTE)** pada dokumen OPD dan pemasangan **firewall serta antivirus** pada server jaringan intra pemerintah. Namun, keterbatasan SDM di bidang keamanan siber masih menjadi kendala. Untuk mengatasinya, Diskominfo berencana bekerja sama dengan **BSSN** guna meningkatkan literasi dan kapasitas keamanan informasi sehingga perlindungan data dapat lebih optimal.

D. Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Secara Garis Besar Pelayanan Bidang PIKP Diskominfo Kab.Natuna terbagi atas :

- **Pengelolaan Platform/Kanal Komunikasi Publik**

Untuk memperluas jangkauan komunikasi publik, Diskominfo Natuna menyampaikan informasi melalui berbagai kanal digital seperti media sosial (X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Threads) serta media non-digital seperti banner, spanduk, dan videotron. Dukungan ini juga diberikan untuk program OPD maupun publikasi informasi bagi masyarakat.

- **Warta Kominfo**

Warta Kominfo adalah media publikasi digital berkala yang memuat kegiatan kepala daerah dan OPD, berisi artikel serta informasi terverifikasi tentang Kabupaten Natuna, dan dapat diakses masyarakat melalui portal resmi natunakab.go.id serta diskominfo.natunakab.go.id.

- **Pengembangan Kemitraan Media**

Untuk memperluas jangkauan informasi, Pemda Natuna mengoptimalkan media komunikasi yang ada serta bekerja sama dengan TV nasional, RRI Ranai, dan sekitar 70 media lokal cetak maupun online. Kerja sama ini dijalankan Diskominfo guna mendukung publikasi informasi pemerintah daerah.

- **Informasi Pengelolaan Aspirasi Publik**

Terkait dengan pelayanan publik Diskominfo Natuna telah melaksanakan beberapa pelayanan publik secara sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi terdiri dari :

- a. Website Kabupaten Natuna (<https://natunakab.go.id>) dan Website Diskominfo Natuna (<https://diskominfo.natunakab.go.id>)

Selain sebagai media publikasi, Diskominfo Natuna juga mengelola website resmi bersama portal Kabupaten Natuna yang menyediakan kotak saran sebagai sarana aspirasi publik bagi masyarakat.

- b. PPID

Sesuai UU KIP, setiap badan publik wajib mengelola informasi dan dokumen. Diskominfo Natuna telah menyediakan layanan informasi publik melalui website PPID (<http://ppid.natunakab.go.id/>) serta pelayanan langsung di kantor Diskominfo.

- c. SP4Lapor

SP4N-LAPOR adalah layanan nasional untuk memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan atau aspirasi terkait pelayanan publik melalui situs www.lapor.go.id, SMS 1708, atau aplikasi mobile. Laporan diteruskan ke instansi terkait dan wajib ditindaklanjuti maksimal 3x24 jam. Di Kabupaten Natuna, Diskominfo menjadi pengelola SP4N-LAPOR sekaligus melakukan sosialisasi agar masyarakat memanfaatkannya sebagai kanal resmi penyampaian aduan

Secara terperinci tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan tujuan, sasaran dan target rencana strategis periode sebelumnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Natuna Tahun 2021-2025

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target Awal	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks SPBE	3,00	3,00	2,43	2,58	2,70	3,00	2,24	2,50	3,19	3,61	-	74,66	102,88	123,64	133,70	-
2	Persentase OPD yang menyelenggarakan <i>e-Government</i>	65,77	65,77	-	-	-	-	85,18	-	-	-	-	129,51	-	-	-	-
Perubahan Pada Renstra Strategis (Renstra) Periode 2021 – 2026																	
2.1	Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	65,77	-	60,09	65,21	70,36	-	-	83,21	77,33	76,00	-	-	138,47	118,58	108,01	-
3	Persentase berita/ informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan	100	100	-	-	-	-	208,18	-	-	-	-	208,18	-	-	-	-
4	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	80	80	-	-	-	-	93,33	-	-	-	-	116,66	-	-	-	-
5	Jenis media sarana informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	100	-	-	-	-
Perubahan Pada Renstra Strategis (Renstra) Periode 2021 – 2026																	

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target Awal	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
3.1	Cakupan Informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	70	-	73	75	80	-	-	159	98	100	-	-	217,80	130,66	125	-
6	Persentase data statistik sektoral yang dipublikasikan	100	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-
Perubahan Pada Renstra Strategis (Renstra) Periode 2021 – 2026																	
4.1	Persentase Ketersediaan Data Statistik sektoral yang terupdate	53	-	55	60	65	-	-	85,11	85,11	100,36	-	-	154,75	154,75	154,40	-
7	Predikat/Nilai Akuntabilitas	A/80	A/80	A/80	A/81,30	A/81,35	-	A/81,21	A/81,01	BB/74,55	BB/75,25	-	100,26	101,26	91,69	92,50	-

Sumber data : Laporan LKjIP Diskominfo Natuna 2021 s/d 2024

II.4 Evaluasi Program Kegiatan dan Indikator Kinerja

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 memiliki 3 urusan dalam menjalankan tupoksi, 5 Tujuan dan menetapkan 5 Indikator Kinerja Utama dengan menjalankan beberapa program, kegiatan dan subkegiatan yang terdiri dari 5 Program, 14 Kegiatan dan 64 SubKegiatan

Dari hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan yang disusun Dinas Komunikasi dan Informatika telah memenuhi aspek perencanaan kinerja yang memadai dan telah memiliki target dan realisasi pelaksanaan hasil program dan kegiatan dalam menyasar pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

BAB III. ANALISIS DAN PENILAIAN

III.1 Hasil Analisis dalam Penilaian Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Natuna

Dalam Menganalisis Dokumen Renstra Diskominfo Natuna dengan menggabungkan analisis dokumen, analisis data kuantitatif-kualitatif yang terdiri dari :

1. Kerangka Penilaian CIPP
CIPP Digunakan untuk mengevaluasi program/renstra dari awal hingga hasil (context, Input Proses, Product)
Dimana
 - Context (Konteks)
Terkait dengan Apakah visi, Misi Tujuan Renstra relevan dengan kebutuhan Masyarakat
 - Input (Masukan)
Apakah Sumber daya (SDM, Anggaran, Sarana) memadai
 - Process (Proses)
Bagaimana pelaksanaan program, efektif atau banyaknya hambatan
 - Product (Produk/Hasil)
Apakah hasil/dampak yang dicapai apakah sesuai target
2. Kerangka Penilaian KPI (Key performance indicators)
KPI Merupakan Ukuran Spesifik untuk menilai kinerja organisasi/program (Indikator Kinerja Utama(IKU)), penilaian lebih difokuskan pada capaian kuantitatif sesuai target berupa angka dimana :
 - a. Persentase capaian indikator renstra
 - b. Rasio realisasi anggaran
 - c. Jumlah layanan publikasi yang terselenggara tepat waktu
3. Balanced Scorecard (BSC)
Digunakan dalam Penilaian Kinerja Organisasi dari 4 perspektif
 - Keuangan
Penilaian keberhasilan dilaksanakan dengan mengukur efisiensi biaya dan serapan anggaran
 - Pelanggan/masyarakat
Dapat diukur dengan Kepuasan layanan, kualitas pelayanan publik
 - Proses internal
Menitik beratkan pada efektifitas alur kerja, SOP, Inovasi Proses
 - Pembelajaran dan pertumbuhan
Dengan melaksanakan peningkatan kompetensi SDM, pengembangan teknologi

Berdasarkan hasil identifikasi dokumen pendukung, Dinas Komunikasi dan Informatika sudah melakukan perencanaan yang baik. Perencanaan tersebut menghubungkan visi dan misi pemerintah daerah dengan tujuan pembangunan, serta mendukung misi kepala daerah yang memiliki target jelas. Capaian kinerja juga dituangkan dalam Laporan Kinerja tahunan, sehingga bisa menjadi pedoman untuk pelaksanaan kinerja di masa depan.

Namun, masih ada beberapa kelemahan. Indikator kinerja yang ditetapkan belum cukup menantang, inovasi belum berjalan optimal, dan pembagian tugas masih kurang jelas karena sering diselesaikan bersama tanpa koordinasi yang baik. Selain itu, tim pelaksana belum terbentuk dengan tepat, salah satunya karena

keterbatasan SDM yang ada belum mampu sepenuhnya mendukung kebutuhan pekerjaan

Berikut Penjabaran Hasil Kerja Pelaksanaan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Natuna

III.2 Identifikasi Keberhasilan Hasil Analisis Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Natuna

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2021–2025, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.3 Indikator Kinerja Sasaran, dapat dijelaskan sebagai berikut :

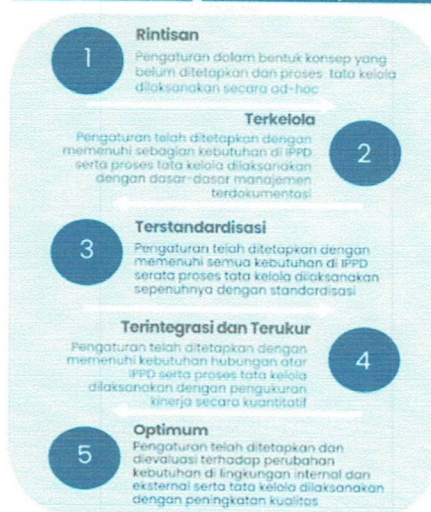
1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peningkatan pencapaian nilai indeks SPBE merupakan Penyelenggaraan Pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE, Evaluasi SPBE ini sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penerapan SPBE diukur dengan Model tingkat kematangan SPBE di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas



Dari Hasil Evaluasi SPBE yang telah terlaksana dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Indeks SPBE
Hasil EVALUASI Periode Tahun 2021 s/d 2024
Pemerintah Kabupaten Natuna



Untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ada beberapa domain nilai index yang harus terpenuhi sebagai berikut :

Nama Indeks
Domain Kebijakan SPBE
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Domain Tata Kelola SPBE
Perencanaan Strategis SPBE
Teknologi Informasi dan Komunikasi
Penyelenggaraan SPBE
Domain Manajemen SPBE
Penerapan Manajemen SPBE
Audit TIK
Domain Layanan SPBE
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dalam upaya pemenuhan nilai Indeks SPBE, Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan berbagai perubahan serta melengkapi sejumlah kekurangan pada domain dan subdomain yang menjadi indikator penilaian. Secara keseluruhan, penilaian Indeks SPBE mencakup 4 domain dan 8 subdomain yang harus dipenuhi secara optimal. Dari hasil pemantauan laporan Evaluasi SPBE terakhir hingga laporan tahun 2024 ini, ditemukan bahwa kelemahan dengan nilai terendah terdapat pada Domain Manajemen SPBE, khususnya pada Subdomain Penerapan Manajemen SPBE. Oleh karena itu, Diskominfo Natuna akan terus berfokus pada

peningkatan domain dan subdomain tersebut guna mendorong perbaikan nilai Indeks SPBE

Peningkatan nilai Indeks ini mencerminkan kinerja Pemerintah Kabupaten Natuna dalam pelayanan publik agar lebih efisien, transparan, akuntabel e-government, sekaligus mendorong digitalisasi di lingkungan OPD maupun masyarakat guna meningkatkan kualitas layanan publik

2. Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penyelenggaraan e-Government merupakan upaya pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung, mengelola, dan meningkatkan proses pemerintahan serta pelayanan publik agar lebih efisien, transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat. Hingga penyusunan Renstra ini, pelaksanaan e-Government di Kabupaten Natuna dapat dirinci sebagai berikut:

1. Status Wilayah (77 Kel/Desa) di Kabupaten Natuna Terkait Kualitas Sinyal Seluler (Untuk Komunikasi dan Akses Informasi/Internet) penjabarannya ditabel 2.4
2. Perangkat Daerah yang Tersedia Layanan Akses Internet/Masuk Dalam Jaringan Intra PEMDA
3. Kelurahan/Desa/Puskesmas/fasilitas Umum lainnya yang tersedia layanan akses internet/masuk dalam jaringan intra pemda
4. Perangkat Daerah yang mengelola Domain dan Subdomain Kabupaten Natuna
5. Email Perangkat Daerah, Aplikasi dan Instansi Lainnya Kabupaten Natuna

Dengan Mengetahui 3 point diatas merupakan suatu keharusan dalam membangun pondasi awal penyelenggaraan e-goverment di Kabupaten Natuna sehingga kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan berbasis digital dapat terlaksana dengan baik.

Tabel 2.4

Status Wilayah (77 Kel/Desa) di Kabupaten Natuna Terkait Kualitas Sinyal Seluler (Untuk Komunikasi dan Akses Informasi/Internet)

Kecamatan/Kelurahan/Desa	Titik Koordinat Kantor Kel/Desa		Jumlah Tower (Menara Telekomunikasi)	"Blank Spot" Sinyal/Akses Internet	"Susah" Sinyal/Akses Internet	"Merdeka" Sinyal/Akses Internet	Keterangan
	Latitude	Longitude					
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Kecamatan Bung. Timur		108.38368					
1. Kelurahan Ranai	3.93713	108.38368	14			√	1 Repeater (XL BAKTI Kominfo)
2. Kelurahan Bandarsah	3.92581	108.37244	6			√	
3. Kelurahan Ranai Darat	3.94363	108.36375	5			√	
4. Kelurahan Batu Hitam	3.92894	108.37793	5			√	
5. Desa Sungai Ulu	3.88806	108.33661	7			√	1 POI (XL BAKTI Kominfo)

6.	Desa Batu Gajah	3.86559	108.35794	2				
7.	Desa Sepempang	3.98771	108.36621	4			√	
B.	Kec. Bung. Timur Laut							
1.	Desa Ceruk	3.99490	108.31426	3			√	
2.	Desa Tanjung	4.01972	108.33853	1			√	
3.	Desa Kelanga	4.04057	108.30934	2			√	
4.	Desa Pengadah	4.12446	108.23799	2		√		Ada 1 Kampung/Dusun hanya terdapat Tower BTS BAKTI Kominfo (XL) kualitas 4G Radiolink (10Mbps)
5.	Desa Sebadai Hulu	4.03041	108.28767	1		√		Karena hanya terdapat Tower BTS BAKTI Kominfo (Tsel) kualitas 4G Vsat (4Mbps)
6.	Desa Limau Manis	3.99866	108.33841	2		√		1 OFF (Indosat reguler)
7.	Desa Selemam	3.98394	108.292764	1		√		Karena hanya terdapat Tower BTS BAKTI Kominfo (XL) kualitas 4G Radiolink (10Mbps)
C.	Kec. Bung Tengah							
1.	Desa Harapan Jaya	3.87267	108.29844	2			√	
2.	Desa Tapau	3.89087	108.28078	3			√	
3.	Desa Air Lengit	3.93216	108.26287	4			√	
D.	Kec. Bung Barat							
1.	Kelurahan Sedanau	3,79527	108,021978	7			√	1 OFF (Indosat reguler)
2.	Desa Mekar Jaya	3.73652	108.13563	2			√	
3.	Desa Binjai	3.80691	108.24283	4			√	1 Repeater
4.	Desa Pian Tengah	3.72696	108.12872	1			√	
5.	Desa Selaut	3.89411	107,91984	1	√			Ada Tower BTS BAKTI Kominfo (Tsel) kualitas 4G Vsat (4Mbps) dan kondisi OFF
E.	Kec. Bung Selatan							
1.	Desa Cemaga	3.78406	108.36174	2			√	
2.	Desa Cemaga Utara	3.84490	108.37813	1		√		Karena hanya terdapat Tower BTS BAKTI Kominfo (XL) kualitas 4G Radiolink (10Mbps)
3.	Desa Cemaga Selatan	3.67575	108.27973	3			√	
4.	Desa Cemaga Tengah	3.80797	108.37543	0	√			Karena belum ada tower di Desa ini
F.	Kec. Bung Batubi							
1.	Desa Batubi Jaya	3.86087	108.14463	1			√	
2.	Desa Gunung Putri	3.87550	108.14944	1			√	
3.	Desa Sedarat Baru	3.84850	108.11935	2			√	
4.	Desa Sedanau Timur	3.81245	108.18761	2			√	

Kecamatan/Kelurahan/Desa		Titik Koordinat Kantor Kel/Desa		Jumlah Tower (Menara Telekomunikasi)	"Blank Spot" Sinyal/Akses Internet	"Susah" Sinyal/Akses Internet	"Merdeka" Sinyal/Akses Internet	Keterangan
		Latitude	Longitude					
5.	Desa Semedang	3.81254	108.17594	0	√			Karena belum ada tower di Desa ini
G.	Kec. Bung Utara							
1.	Desa Kelarik	3.98812	107.99655	2			√	
2.	Desa Kelarik Utara	4.00719	108.01057	1			√	
3.	Desa Kelarik Air Mali	4.00746	107.98762	1			√	
4.	Desa Teluk Buton	4.22393	108.20857	2			√	1 OFF (Telkomsel BAKTI Kominfo)
5.	Desa Belakang Gunung	3.98611	108.02347	1		√		Karena hanya terdapat Tower BTS BAKTI Kominfo (XL) kualitas 4G Radiolink (10Mbps)
6.	Desa Gunung Durian	3.98794	108.00474	1		√		Ada Tower BTS BAKTI Kominfo Kominfo (Tsel) kualitas 4G Vsat (4Mbps) dan kondisi OFF
H.	Kec. Pulau Tiga							
1.	Desa Sededap	3.57963	108.04756	1			√	
2.	Desa Sabang Mawang	3.63354	108.11058	2			√	1 Repeater
3.	Desa Tanjung Batang	3.61355	108.08289	1			√	
4.	Desa Serantas	3.59795	108.08715	1		√		Karena hanya terdapat Tower BTS BAKTI Kominfo (Tsel) kualitas 4G Vsat (4Mbps)
5.	Desa Sabang Mawang Barat	3.63360	108.11061	1			√	
6.	Desa Teluk Labuh	3.58776	108.04476	1		√		Karena hanya terdapat Tower BTS BAKTI Kominfo (XL) kualitas 4G Radiolink (10Mbps)
I.	Kec. Pulau Tiga Barat							
1.	Desa Pulau Tiga	3.635555	108.08168	0		√		Karena belum ada tower di Desa ini, hanya bias dari sinyal tower terdekat
2.	Desa Tanjung Kumbik Utara	3.64133	108.08585	3			√	1 OFF (Indosat)
3.	Desa Setumuk	3.66472	108.06367	0		√		Karena belum ada tower di Desa ini, hanya bias dari sinyal tower terdekat
4.	Desa Selading	3.64167	108.05819	2		√		Karena tower yang ada dengan teknologi VSat (Tsel BAKTI Kominfo & Isat reguler)
J.	Kecamatan Midai							

1.	Desa Sabang Barat	3.00751	107.75291	2		√		isu kapasitas bandwidh kurang untuk Site Telkomsel reguler
2.	Desa Sebelat	2.99364	107.77295	3		√		1 OFF (Indosat) & isu kapasitas bandwidh kurang untuk Site Telkomsel reguler
3.	Desa Air Putih	2.97719	107.76178	0	√			Karena belum ada tower di Desa ini
K.	Kec. Suak Midai							
1.	Desa Air Kumpai	3,01756	107,77741	2		√		1 OFF (Tsel BAKTI Kominfo) & isu kapasitas bandwidh kurang untuk Site Telkomsel reguler
2.	Desa Batu Belanak	3.00631	107.80528	1	√			Ada Tower BTS BAKTI Kominfo (Tsel) kualitas 4G Vsat (4Mbps) dan kondisi OFF
3.	Desa Gunung Jambat	3.00213	107.79213	1		√		isu kapasitas bandwidh kurang untuk Site Telkomsel reguler
L.	Kec. Serasan							
1.	Kantor Kelurahan Serasan	2,5099166 7	109,0275	2			√	1 Repeater
2.	Desa Kampung Hilir	2,503013	109,014604	0			√	Wilayah ini dicover dari Tower di Kelurahan Serasan & Tanjung Setelung
3.	Desa Batu Berian	2.49191	108.95557	1		√		Karena hanya terdapat Tower BTS BAKTI Kominfo (XL) kualitas 4G Vsat (4Mbps)
4.	Desa Tanjung Setelung	2,498969	109,009688	2			√	1 OFF (Telkomsel BAKTI Kominfo)
5.	Desa Tanjung Balau	2.48489	109.02900	1		√		Karena hanya terdapat Tower BTS BAKTI Kominfo (Tsel) kualitas 4G Vsat (4Mbps) dan sering mengalami gangguan
6.	Desa Pangkalan	2.51545	109.04033	1			√	
7.	Desa Jermalik	2.54462	108.98623	1		√		Karena hanya terdapat Tower BTS BAKTI Kominfo (XL) kualitas 4G Vsat (4Mbps)
M.	Kec. Serasan Timur							
1.	Desa Arung Ayam	2.50566	109.05596	1			√	
2.	Desa Air Nusa	2.49590	109.07105	1		√		Karena hanya terdapat Tower BTS BAKTI Kominfo (XL)

								kualitas 4G Vsat (4Mbps)
3.	Desa Air Ringau	2,497703	109,045004	0		√		Sebagian wilayah dicover dari Site Arung Ayam, tapi terdapat pemukiman warga yang terhalang kontur bukit untuk mendapatkan sinyal dari tower terdekat
4.	Desa Payak	2.50708	109.07420	2			√	
N.	Kec. Subi							
1.	Desa Subi Besar	3.00396	108.86430	0		√		Karena belum ada tower di Desa ini, hanya bias dari sinyal tower terdekat
2.	Desa Subi	3.01441	108.86359	2			√	1 OFF (Indosat reguler)
3.	Desa Meliah	3.03370	108.85767	2		√		1 Repeater & hanya terdapat Tower BTS BAKTI Kominfo kualitas 4G Vsat (4Mbps)
4.	Desa Terayak	3.01793	108.85657	0		√		Karena belum ada tower di Desa ini, hanya bias dari sinyal tower terdekat
5.	Desa Subi Besar Timur	3.004311	108.866755	0		√		Karena belum ada tower di Desa ini, hanya bias dari sinyal tower terdekat
6.	Desa Meliah Selatan	3.03011	108.86330	0		√		Karena belum ada tower di Desa ini, hanya bias dari sinyal tower terdekat
O.	Kec. Pulau Laut							
1.	Desa Air Payang	4.69828	107.94453	1			√	
2.	Desa Tanjung Pala	4.73995	107.99689	2		√		Karena keduanya Tower BTS BAKTI Kominfo kualitas 4G Vsat (4Mbps) dan posisi jauh dari pemukiman warga
3.	Desa Kadur	4.74473	107.98194	2			√	1 OFF (Telkomsel BAKTI Kominfo)
P.	Kec. Pulau Seluan							
1.	Desa Seluan Barat	4.74473	107.84424	1	√			Ada Tower BTS BAKTI Kominfo (Tsel) kualitas 4G Vsat (4Mbps) dan kondisi OFF
2.	Desa Kelarik Barat	4.12515	107.84424	1		√		Karena hanya terdapat Tower BTS BAKTI Kominfo (XL) kualitas 4G Vsat (4Mbps)
Q.	Kec. Pulau Panjang	4.11995	107.84570					
1.	Desa Pulau Panjang	2.75044	108.91100	1			√	

2.	Desa Pulau Kerdau	2.70500	108.88171	1		√		Karena hanya terdapat Tower BTS BAKTI Kominfo (XL) kualitas 4G Vsat (4Mbps)
TOTAL					6	29	42	
PERSENTASE					7,79	37,66	54,55	

Berdasarkan tabel di atas, masih terdapat daerah yang mengalami blank spot, yaitu sebanyak 6 desa dari total 77 desa atau sebesar 7,79%. Sementara itu, desa yang tergolong susah sinyal/akses internet berjumlah 29 desa dengan persentase 37,66%. Adapun desa yang sudah merdeka sinyal atau memiliki akses internet yang baik tercatat sebanyak 42 desa atau 54,55%. Dengan demikian, hampir setengah wilayah Kabupaten Natuna telah memperoleh akses internet yang memadai. Dukungan ini diharapkan mampu mendorong perluasan jaringan ke seluruh wilayah Natuna sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya serta mendukung kelancaran penyelenggaraan e-Government.

Tabel 2.5

Perangkat Daerah yang Tersedia layana Akses Internet/Masuk Dalam Jaringan
Intra PEMDA

No	Nama Perangkat Daerah
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat
4	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
10	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
12	Dinas Pemuda dan Olahraga
13	Dinas Lingkungan Hidup
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
18	Dinas Perikanan
19	Dinas Pemadam Kebakaran
20	Dinas Kesehatan
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
24	Dinas Perhubungan

25	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
26	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
28	Dinas Pariwisata
29	Satuan Polisi Pamong
30	Dinas Sosial
31	Camat Bunguran Timur
32	Camat Bunguran Timur Laut
33	Camat Bunguran Selatan
34	Camat Bunguran Tengah
35	RSUD Natuna

Tabel 2.6

Kelurahan/Desa/Puskesmas/Fasilitas Umum Lainnya yang tersedia Layanan Akses Internet/Masuk Dalam Jaringan Intra PEMDA

No	Nama Perangkat Daerah	Keterangan
1	Kelurahan Ranai Kota Kec. Bunguran Timur	
2	Kelurahan Ranai Darat Kec. Bunguran Timur	
3	Kelurahan Bandarsyah Kec. Bunguran Timur	
4	Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur	
5	Kelurahan Batu Hitam Kec. Bunguran Timur	
6	Desa Tapau Kec. Bunguran Tengah	
7	Desa Harapan Jaya Kec. Bunguran Tengah	
8	Desa Kelanga Kec. Bunguran Timur Laut	
9	Desa Ceruk Kec. Bunguran Timur Laut	
10	Desa Limau Manis Kec. Bunguran Timur Laut	
11	Desa Tanjung Kec. Bunguran Timur Laut	
12	Desa Sepampang Kec. Bunguran Timur	
13	Desa Batu Gajah Kec. Bunguran Timur	
14	Desa Sungai Ulu Kec. Bunguran Timur	
15	Puskesmas Bunguran Timur	
16	Puskesmas Bunguran Timur Laut	
17	Puskesmas Bunguran Tengah	
18	Gedung Daerah	
19	Gedung Wanita	
20	Gedung Museum	
21	Sekretariat Dekranasda	
22	Gedung PLUT	
23	Mesjid Agung Baitul Izza	Wifi Publik
24	Pos Dishub	

25	GOR Pemkab Natuna	Wifi Publik
26	Sekretariat Geopark	
27	UKSPF Bunguran Timur	Wifi Publik
28	Kantor UKPBJ/LPSE	Wifi Publik
29	Pantai Piwang 1	Wifi Publik
30	Pantai Piwang 2	Wifi Publik
31	Lapangan Bola Srintit	Wifi Publik
32	Gedung Sri Srintit	Wifi Publik
33	Pasar Ranai 1	
34	Pasar Ranai 2	
35	Kejari Ranai	
36	Rumdin N1	
37	Rumdin N2	
38	Rumdin N3	
39	Rumdin Diskominfo	

Tabel 2.7

Perangkat Daerah yang Mengelola Domain dan Sub Domain Kabupaten Natuna

No	Nama Perangkat Daerah	Keterangan
1.	Sekretariat Daerah	setda.natunakab.go.id
2.	Sekretariat DPRD	setwan.natunakab.go.id
3.	Inspektorat	inspektorat.natunakab.go.id
4.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	kesbangpol.natunakab.go.id
6.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	bp3d.natunakab.go.id
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd.natunakab.go.id
8.	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	bpkad.natunakab.go.id
9.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	bkpsdm.natunakab.go.id
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	diskominfo.natunakab.go.id
11.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	bp3d.natunakab.go.id
12.	Dinas Pemuda dan Olahraga	disdikpora.natunakab.go.id
13.	Dinas Lingkungan Hidup	dlh.natunakab.go.id
14.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	disnakertrans.natunakab.go.id

15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	dpmd.natunakab.go.
16.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	bp3d.natunakab.go.id
17.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	dprkpp.natunakab.go.id
18.	Dinas Perikanan	diskan.natunakab.go.id
19.	Dinas Pemadam Kebakaran	disdamkar.natunakab.go.id
20.	Dinas Kesehatan	dinkes-ppkb.natunakab.go.id
21.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	disdik.natunakab.go.id
22.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	disdukcapil.natunakab.go.id
23.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	distan.natunakab.go.id
24.	Dinas Perhubungan	dishub.natunakab.go.id
25.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dp3ap2kb.natunakab.go.id
26.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	disperindagkopum.natunakab.go.id
27.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	dpmpstsp.natunakab.go.id
28.	Dinas Pariwisata	dinaspariwisata.natunakab.go.id
29.	Satuan Polisi Pamong Praja	polpp.natunakab.go.id
30.	Dinas Sosial	dinsos.natunakab.go.id
31.	Camat Bunguran Timur	kecbungtim.natunakab.go.id
32.	Camat Bunguran Timur Laut	kecbungtila.natunakab.go.id
33.	Camat Bunguran Selatan	kecbungsel.natunakab.go.id
34.	Camat Bunguran Tengah	kecbungut.natunakab.go.id
35.	Camat Bunguran Utara	kecbungut.natunakab.go.id
36.	Camat Bunguran Barat	kecbungbar.natunakab.go.id
37.	Camat Bunguran Batubi	kecbungbatubi.natunakab.go.id
38.	Camat Pulau Tiga	kecpulautiga.natunakab.go.id
39.	Camat Pulau Tiga Barat	kecbungtigabar.natunakab.go.id
40.	Camat Pulau Laut	kecpulaulaut.natunakab.go.id
41.	Camat Midai	kecmidai.natunakab.go.id
42.	Camat Suak Midai	Kecsukmidai.natunakab.go.id
43.	Camat Serasan	kecsasaran.natunakab.go.id
44.	Camat Serasan Timur	kecsasantimur.natunakab.go.id

45.	Camat Pulau Panjang	kecupaulpanjang.natunakab.go.id
46.	Camat Seluan	kecseluan.natunakab.go.id
47.	Camat Subi	kecsubi.natunakab.go.id

Tabel 2.8
Aplikasi dan Instansi Lainnya yang Mengelola Domain dan Sub Domain
Kabupaten Natuna

No	Nama Perangkat Daerah	Keterangan
	Aplikasi	
1.	Sikekah	sikekah.natunakab.go.id
2.	PPID	ppid.natunakab.go.id
3.	SP4N Lapor	lapor.natunakab.go.id
4.	SIPP	sipp.natunakab.go.id
5.	Natuna Sehat	natunasehat.natunakab.go.id
6.	Kabupaten Sehat	kabupatensehat.natunakab.go.id
7.	APIBPHTB	apibphtb.natunakab.go.id
8.	Epayment	epayment.natunakab.go.id
9.	Simapada	simapada.natunakab.go.id
10.	e-Planning	eplanning.natunakab.go.id
11.	Sipedeq	sipedek.natunakab.go.id
12.	Potensi Desa	potensidesa.natunakab.go.id
13.	Informasi Desa	informasidesa.natunakab.go.id
14.	Covid19	covid19.natunakab.go.id
15.	Pamsimas	pamsimas.natunakab.go.id
16.	Sibakso	sibakso.natunakab.go.id
No	Nama Perangkat Daerah	Keterangan
17.	Pusake	pusake.natunakab.go.id
18.	E-Sakip	esakip.natunakab.go.id
19.	SDGs	sdgs.natunakab.go.id
20.	APPS	apps.natunakab.go.id
21.	Data	data.natunakab.go.id
22.	Data Desa	datadesa.natunakab.go.id
23.	Desa	desa.natunakab.go.id
24.	Ila	ila.natunakab.go.id
25.	Infis	infis.natunakab.go.id
26.	Infisapps	infisapps.natunakab.go.id
27.	JDIH	jdih.natunakab.go.id
28.	Mediacenterdesa	mediacenterdesa.natunakab.go.id
29.	Ngadu	ngadu.natunakab.go.id
30.	Sipetarung	sipetarung.natunakab.go.id
31.	Statistic	statistik.natunakab.go.id
32.	Link (Diskominfo)	link.natunakab.go.id

33.	Natunakab	natunakab.go.id
34.	Satu Data	satudata.natunakab.go.id
35.	Sedia Nasi	sedianasi.natunakab.go.id
36.	Sipenting	sipenting.natunakab.go.id
	Instansi Lainnya	
1.	Rumah Sakit Umum Daerah	rsud.natunakab.go.id
2.	LPSE	lpse.natunakab.go.id
3.	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	baznas.natunakab.go.id
4.	Geopark Natuna	geopark.natunakab.go.id
5.	Puskesmas Kelarik	puskesmas-kelarik.natunakab.go.id
6.	Puskesmas Ranai	puskesmasranai.natunakab.go.id
7.	Puskesmas Serasan Timur	puskemasserasantimur.natunakab.go.id
8.	BPS	bps.natunakab.go.id
9.	Dekranasda	dekranasda.natunakab.go.id
10.	Smansa	smansa.natunakab.go.id
11.	SMP satu Atap Pengadah	smpnsatappengadah.natunakab.go.id
12.	Kemenag	kemenag.natunakab.go.id
13.	Mall Pelayanan Publik	mpp.natunakab.go.id

Tabel 2.9

Email Perangkat Daerah, Aplikasi dan Instansi Lainnya Kabupaten Natuna

No	Nama Perangkat Daerah	Keterangan
1.	Sekretariat Daerah	setda@natunakab.go.id
2.	Sekretariat DPRD	setwan@natunakab.go.id
3.	Inspektorat	inspektorat@natunakab.go.id
4.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	bpbd@natunakab.go.id
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	kesbangpol@natunakab.go.id
6.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	bp3d@natunakab.go.id
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd@natunakab.go.id
8.	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	bpkpd@natunakab.go.id
9.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	bkpsdm@natunakab.go.id
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	diskominfo@natunakab.go.id

11.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	disperpusip@natunakab.go.id
12.	Dinas Pemuda dan Olahraga	dispورا@natunakab.go.id
13.	Dinas Lingkungan Hidup	dlh@natunakab.go.id
14.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	disnakertrans@natunakab.go.id
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	dpmd@natunakab.go.id
16.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	bp3d@natunakab.go.id
17.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	dprkpp@natunakab.go.id
18.	Dinas Perikanan	diskan@natunakab.go.id
19.	Dinas Pemadam Kebakaran	disdamkar@natunakab.go.id
20.	Dinas Kesehatan	dinkes@natunakab.go.id
21.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	disdikbud@natunakab.go.id
22.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	disdukcapil@natunakab.go.id
23.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	distan@natunakab.go.id
24.	Dinas Perhubungan	dishub@natunakab.go.id
25.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	dp3ap2kb@natunakab.go.id
26.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	disperindagkopum@natunakab.go.id
27.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	dpmptsp@natunakab.go.id
28.	Dinas Pariwisata	dinaspariwisata@natunakab.go.id
29.	Satuan Polisi Pamong Praja	polpp@natunakab.go.id
30.	Dinas Sosial	dinsos@@natunakab.go.id
31.	Camat Bunguran Timur	kecbungtim.natunakab.go.id
32.	Camat Bunguran Timur Laut	kecbungtila@natunakab.go.id
33.	Camat Bunguran Selatan	kecbungselatan@natunakab.go.id
34.	Camat Bunguran Tengah	kecbungtengah@natunakab.go.id

No	Nama Perangkat Daerah	Keterangan
35.	Camat Bunguran Utara	kecbungutara@natunakab.go.id
36.	Camat Bunguran Barat	kecbungbarat@natunakab.go.id
37.	Camat Bunguran Batubi	kecbatubi@natunakab.go.id
38.	Camat Pulau Tiga	kecpulautiga@natunakab.go.id
39.	Camat Pulau Tiga Barat	kecbungpulautigabarat@natunakab.go.id
40.	Camat Pulau Laut	kecpulaulaut@natunakab.go.id
41.	Camat Midai	kecmidai@natunakab.go.id
42.	Camat Suak Midai	kecsuakmidai@natunakab.go.id
43.	Camat Serasan	kecserasan@natunakab.go.id
44.	Camat Serasan Timur	kecserasantimur@natunakab.go.id
45.	Camat Pulau Panjang	kecpulaupanjang@natunakab.go.id
46.	Camat Seluan	kecseluan@natunakab.go.id
47.	Camat Subi	kecsubi@natunakab.go.id
	Instansi Lainnya	
1.	Rumah Sakit Umum Daerah	rsud@natunakab.go.id
2.	LPSE	lpse@natunakab.go.id
3.	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	baznas@natunakab.go.id
4.	Geopark Natuna	geopark@natunakab.go.id
5.	Desa	desa@natunakab.go.id
6.	Kemenag	Kemenag@natunakab.go.id
7.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	kesra@natunakab.go.id
8.	Bagian Organisasi	organisasi@natunakab.go.id
9.	Bagian Kerjasama	bagkerjasama@natunakab.go.id
10.	Bagian Ortal	ortal@natunakab.go.id
11.	Bagian Pembangunan	pembangunan@natunakab.go.id
12.	Bagian Umum	umumperlengkapan@natunakab.go.id
13.	Bagian Prokopim	prokopim@natunakab.go.id
14.	Mall Pelayanan Publik (MPP)	mpp@natunakab.go.id
15.	LPSE	lpse@natunakab.go.id
16.	ULP	ulp@natunakab.go.id
17.	UKPBJ	ukpbj@natunakab.go.id
18.	Puskesmas Bunguran Utara	pkmkelarik@natunakab.go.id
19.	Puskesmas Bunguran Timur	pkmranai@natunakab.go.id
20.	Puskesmas Bunguran Selatan	pkmbungsel@natunakab.go.id
21.	Puskesmas Bunguran Timur Laut	pkmtanjung@natunakab.go.id
22.	Puskesmas Pulau Panjang	pkmpulaupanjang@natunakab.go.id
23.	Puskesmas Seluan	pkmpulauseluan@natunakab.go.id

No	Nama Perangkat Daerah	Keterangan
24.	Puskesmas Bunguran Tengah	pkmbungtengah@natunakab.go.id
25.	Puskesmas Pulau Laut	pkmpulaulaut@natunakab.go.id
26.	Puskesmas Suak Midai	pkmsuakmidai@natunakab.go.id
27.	Puskesmas Pulau Tiga	pkmpulautiga@natunakab.go.id
28.	Puskesmas Pulau Tiga Barat	pkmpultibar@natunakab.go.id
29.	Puskesmas Bunguran Barat	pkmbungbar@natunakab.go.id
30.	Puskesmas Serasan	pkmserasan@natunakab.go.id
31.	Puskesmas Bunguran Batubi	pkmbatubi@natunakab.go.id
32.	Puskesmas Midai	pkmmidai@natunakab.go.id
33.	Puskesmas Serasan Timur	pkmsanti@natunakab.go.id
34.	Puskesmas Subi	pkmsubi@natunakab.go.id
35.	PKK	pkk@natunakab.go.id
36.	SMA 1 Bunguran Timur	admin@smansa.natunakab.go.id
37.	SMP 1 Atap Pengadah	pengadahsmpnsatap@gmail.com

Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Natuna dalam bidang pengembangan layanan teknologi informasi dan komunikasi menunjukkan hasil yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya perangkat daerah yang telah terhubung dalam jaringan intra PEMDA sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.5, serta tersedianya layanan akses internet yang menjangkau kelurahan, desa, puskesmas, dan fasilitas umum lainnya sebagaimana tercantum pada Tabel 2.6. Lebih lanjut, pada Tabel 2.7 terlihat bahwa sejumlah perangkat daerah telah melaksanakan pengelolaan domain dan subdomain resmi Kabupaten Natuna, yang didukung pula oleh keberadaan berbagai aplikasi serta instansi lain yang turut mengelola domain dan subdomain sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.8. Keseluruhan capaian tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Natuna dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government) yang efektif, transparan, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain:

1. Tingkat keamanan informasi yang belum sepenuhnya optimal.
2. Publikasi informasi oleh masing-masing perangkat daerah yang masih belum maksimal, khususnya dalam hal pembaruan data dan informasi.
3. Pemanfaatan aplikasi khusus yang dikelola Pemerintah Kabupaten Natuna belum berjalan secara optimal, serta pendataan terhadap aplikasi yang terintegrasi masih belum tersedia.

Ke depan, pelaksanaan e-government akan difokuskan pada pemeliharaan dan perawatan jaringan, peningkatan frekuensi pembaruan informasi dan data pada setiap kanal yang dimiliki perangkat daerah minimal satu kali dalam sebulan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan dan teknologi informasi dalam meminimalkan kendala yang dihadapi tersebut serta penguatan audit TIK.

3 Cakupan Informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media

Tahun 2022 Merupakan Perubahan awal dari Indikator Kinerja yang berpedoman kepada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2021 – 2026 seiring dengan perubahan RPJMD 2016 – 2021 menjadi RPJMD 2021 – 2026 dengan terpilihnya Kepala daerah yang baru dengan visi dan misi baru sehingga perubahan dan penyempurnaan pengukuran kinerja yang awalnya “Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan” diubah menjadi Cakupan Informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media disebabkan tingkat pengukuran akan tingkatan Bukan Hanya pada Kelompok Informasi Masyarakat namun juga pada tingkat prioritas program, kegiatan yang dijalankan oleh kepala daerah dalam penyebarluasan ke masyarakat atas kerja dan kinerja pemerintah daerah melalui pembuatan berbagai media online (website Kabupaten(<https://natunakab.go.id/>) dan Website Diskominfo Natuna(<https://diskominfo.natunakab.go.id/>)), kerjasama media, videotron (Videotron Panggung dan Videotron), Media sosial kanal youtube, Tiktok dan saluran whatapp

Berikut hasil Rekapitulasi Berita/Informasi periode tahun 2021 s/d 2024 dipublikasikan Sebagai Berikut :

Grafik 1.1
Hasil Publikasi Berita/Informasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang Dipublikasikan



Tabel 2.10
Hasil Publikasi Berita/informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan

No	Jenis Publikasi/Tim Penyusun	2021	2022	2023	2024
1	Tim Diskominfo	245	636	1.222	1.676
	Publikasi Melalui Media Sosial		539	614	2.095
	Publikasi Melalui Website		197	608	627
2	Prokopim & lainnya	88	-	-	-
Total		333	1.372	2.444	4398

Tabel 2.11
Rekapitulasi Data dan Perbandingan Kunjungan Website

No	Domain/Subdomain PEMDA	Jumlah Visitor			Jumlah Page View		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	natunakab.go.id	58.988	17.703	41.720	67.481	21.953	33.062
2	diskominfo.natunakab.go.id	36.644	24.553	6.9695	45.215	28.855	85.223

Data pada Tabel 2.10 dan Tabel 2.11 menunjukkan perkembangan publikasi berita serta informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Natuna pada periode 2021–2024. Jumlah publikasi mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas keterbukaan informasi publik. Media sosial menjadi kanal utama penyebaran informasi, disusul oleh website resmi pemerintah.

Sementara itu, data kunjungan website resmi pemerintah daerah, khususnya domain **natunakab.go.id**, memperlihatkan adanya fluktuasi. Setelah jumlah pengunjung menurun cukup tajam pada tahun 2023, trafik kembali meningkat pada tahun 2024. Kondisi ini menegaskan pentingnya strategi pengelolaan konten yang konsisten, informatif, dan menarik agar interaksi masyarakat dengan website pemerintah dapat terus berkembang.

Secara keseluruhan, publikasi informasi pemerintah daerah melalui media online menunjukkan tren yang semakin meningkat, khususnya melalui media sosial. Namun, untuk menjaga dan meningkatkan jumlah kunjungan ke website resmi pemerintah, diperlukan penguatan strategi konten digital serta optimalisasi seluruh kanal informasi yang dimiliki.

4 Persentase Ketersediaan Data Statistik sektoral yang terupdate

Pemerintah Kabupaten Natuna saat ini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data melalui program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Program ini menekankan pentingnya penyusunan **Data Statistik Sektoral** agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat sasaran, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya data yang terstruktur, pembangunan di Natuna diharapkan bisa lebih terarah dan terukur.

Salah satu bentuk implementasi dari kebijakan ini adalah penyusunan **Buku Satu Data Natuna**, yaitu kumpulan data statistik sektoral yang disajikan dari berbagai instansi di daerah. Buku ini berfungsi sebagai rujukan resmi yang memuat informasi penting dari berbagai bidang pembangunan. Dengan begitu, semua pihak yang membutuhkan data dapat mengakses sumber yang sama dan terpercaya.

Selain itu, setiap data yang dihimpun juga dilengkapi dengan **metadata**, yaitu penjelasan tentang asal-usul, definisi, dan cara pengumpulan data. Kehadiran metadata membuat data lebih transparan dan mudah dipahami, baik oleh pemerintah, akademisi, maupun masyarakat umum. Untuk memudahkan akses, data tersebut juga terhubung melalui **link Satu Data Natuna** (<https://satudata.natunakab.go.id/>) sehingga bisa diakses secara daring dengan cepat dan praktis serta telah terintegrasi dengan satu data Indonesia dalam hal ini setiap data yang dimiliki oleh Kabupaten Natuna telah terorganisir dengan baik yang berdasarkan pasal 36, peraturan presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta pasal 4, Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang pengelolaan portal satu data Indonesia menyebutkan bahwa penyebarluasan data dilakukan melalui portal satu data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk memperkuat tata kelola, dibentuklah **Forum Satu Data Natuna** sebagai wadah koordinasi antarinstansi. Forum ini berperan penting dalam memastikan data yang dihasilkan benar-benar valid, konsisten, dan saling terintegrasi. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan sistem **E-Wali Data SIPD** yang berfungsi sebagai sarana digital dalam pengelolaan data daerah, sehingga seluruh proses pendataan menjadi lebih modern, efisien, dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

5 Predikat/Nilai Akuntabilitas

Peningkatan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna merupakan hasil penilaian atas kinerja tahunan yang di keluarkan untuk mengetahui seberapa efektifitasnya pelaksanaan tugas dan fungsi terkait target dan hasil kerja sebuah OPD yang dikaitkan dengan pelaksanaan pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, Perhitungan capaian sasaran, ditetapkan dengan penilaian rata – rata seluruh capaian indikator kinerja hasil setiap sasaran yang hasilnya dikelompokkan dalam kategori Penilaian sebagaimana mengacu pada petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Sebagai Berikut :

Tabel 2.12
Kategori Capaian Kinerja

No	Kategori	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup
6	C	>30-50	Agak Kurang
7	D	0-30	Kurang

Hasil evaluasi AKIP yang telah terlaksana periode 2021 s/d 2024 Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dapat dijabarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.12
Nilai Komponen dan Subkomponen Evaluasi AKIP
Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai (Hasil Evaluasi)			
			2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan Strategis	10,00	8,78	-	-	-
2	Perencanaan Kinerja Tahunan	20,00	18,50	24,00	22,80	22,80
3	Pengukuran Kinerja	25,00	20,00	22,20	22,80	22,80
4	Pelaporan Kinerja	15,00	12,23	12,60	11,40	10,95
5	Evaluasi Internal	10,00	6,89			
6	Capaian Kinerja	20	13,75			
7	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			15,75	18,25	19,00
Total Nilai		100	81,01	74	75,25	75,55
Prediket			A	BB	BB	BB

Hasil evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa aspek perencanaan kinerja tahunan dan pengukuran kinerja mengalami tren positif dan relatif stabil, sementara evaluasi akuntabilitas kinerja internal juga

memperlihatkan peningkatan yang konsisten sejak tahun 2022. Namun demikian, pelaporan kinerja terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun sehingga menjadi kelemahan utama yang perlu segera dibenahi. Sejak tahun 2022, beberapa komponen seperti perencanaan strategis, evaluasi internal, dan capaian kinerja tidak lagi dinilai secara mandiri, kemungkinan besar telah diintegrasikan ke dalam indikator evaluasi yang lebih menyeluruh. Secara keseluruhan, nilai total AKIP menunjukkan fluktuasi dengan capaian 81,01 (predikat A) pada 2021, kemudian menurun dan bertahan pada predikat BB (74,00–75,55) dalam periode 2022–2024. Kondisi ini mencerminkan bahwa kinerja akuntabilitas Dinas Kominfo relatif stabil dengan adanya perbaikan di beberapa aspek, tetapi masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas dan konsistensi pelaporan kinerja.

BAB IV. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

IV.1 Rekomendasi Hasil Evaluasi, Analisis dan Penilaian

Rekomendasi laporan hasil evaluasi ini adalah :

1. Peningkatan Pengelolaan system digital dengan standar kerja yang jelas, pengawasan rutin
2. Optimalikan Infrastruktur Digital Manfaatkan internet, domain, dan aplikasi yang sudah ada di OPD, desa, puskesmas, serta fasilitas umum
3. Pelaksanaan Penguatan Perencanaan Konten yang konsisten, informative dan menarik guna peningkatan kunjungan dalam mendukung peningkatan literasi digital.
4. Memaksimalkan pemanfaatan media social dank anal publikasi daerah dengan kolaborasi denga OPD, Kecamatan Desa dan masyarakat untuk peningkatan publikasi informasi dengan dukungan data yang akurat
5. Tingkatkan pemanfaatan portal daring (<https://satudata.natunakab.go.id/>) dengan desain yang ramah pengguna, konten yang selalu diperbarui, dan akses yang mudah bagi masyarakat serta pemangku kepentingan.
6. Lakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, akademisi, dan dunia usaha tentang pentingnya memanfaatkan data sektoral sebagai sumber informasi resmi untuk penelitian, perencanaan, maupun pengambilan keputusan.

IV.2 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi, Analisis dan Penilaian

Tindaklanjut laporan hasil evaluasi ini adalah :

1. **Peningkatan Pengelolaan Sistem Digital**
 - o Menyusun SOP standar kerja pengelolaan digital di setiap OPD.
 - o Melaksanakan audit dan pengawasan rutin terhadap layanan digital minimal setiap semester.
2. **Optimalisasi Infrastruktur Digital**
 - o Melakukan inventarisasi infrastruktur digital (internet, domain, aplikasi) yang sudah tersedia di OPD, desa, dan puskesmas.
 - o Pemeliharaan berkala serta pengembangan aplikasi sesuai kebutuhan layanan publik.
3. **Penguatan Perencanaan Konten Digital**
 - o Membentuk tim editorial untuk memastikan konsistensi dan kualitas konten publikasi.
 - o Menetapkan kalender konten bulanan dengan format informatif, edukatif, dan menarik.
4. **Maksimalisasi Pemanfaatan Media Sosial dan Kanal Publikasi**
 - o Mengembangkan kolaborasi antar-OPD, kecamatan, desa, dan komunitas masyarakat.
 - o Membuat mekanisme berbagi data/informasi yang akurat untuk mendukung publikasi daerah.
5. **Pengembangan Portal Satu Data Natuna**
 - o Melakukan evaluasi desain portal agar lebih ramah pengguna.

- Memperbarui konten secara rutin dan memastikan sinkronisasi dengan Satu Data Indonesia.
6. **Sosialisasi dan Edukasi Pemanfaatan Data Sektoral**
- Menyelenggarakan workshop, seminar, dan pelatihan pemanfaatan data sektoral bagi masyarakat, akademisi, dan dunia usaha.
 - Membuat panduan singkat atau *user guide* untuk memudahkan publik dalam mengakses dan menggunakan data

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Evaluasi Renstra yang dilaksanakan ini maka dapat ditarik kesimpulan Dalam pelaksanaan Renstra 2021–2026, Diskominfo Natuna telah mencatat beberapa kemajuan, seperti meningkatnya akses informasi publik melalui website, media sosial, dan sistem internal. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi juga mendukung layanan komunikasi, meski masih terkendala kondisi geografis kepulauan. Transparansi pemerintahan semakin baik, masyarakat lebih mudah mengakses data, serta penerapan SPBE terus diperkuat dengan infrastruktur TIK dan peningkatan kapasitas aparatur. Namun, keterbatasan anggaran, kondisi wilayah kepulauan, dan kurangnya SDM TIK masih menjadi hambatan dalam pemerataan jaringan dan optimalisasi digitalisasi. Secara keseluruhan, capaian Diskominfo sudah positif, tetapi perlu strategi dan kebijakan lebih kuat agar hambatan dapat diatasi. Seluruh langkah Renstra ini harus tetap selaras dengan RPJMD Kabupaten Natuna 2021–2026 sebagai arah pembangunan daerah.

Demikian hasil evaluasi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna. Besar harapan agar laporan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung kemajuan serta menambah literasi masyarakat terkait perencanaan dan pelaksanaan yang tercantum dalam Renstra. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Natuna, Agustus 2025

Kepala Dinas,



IKHWAN SOLIHIN, SE, M.A
NIP. 19711208 200003 1 005



Pemerintah Kabupaten Natuna
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Batu Sisir, Bukit Arai Gedung B Pulau Senoa Lt.II Natuna, Kepulauan Riau 29777



KOMDIGI